

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Heru Pastikan Tak Setop KJMU

Gambir, Warta Kota

Beredar informasi di sosial media adanya mahasiswa yang tak bisa melanjutkan kuliah karena Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut Pemprov DKI Jakarta.

Penjabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan KJMU yang sudah berjalan dan diterima mahasiswa tidak akan dihentikan.

"Jadi gini, di DKI Jakarta itu bisa di-link-kan. Dengan data di Bappenda, data kendaraan, data rumah, data aset, link," katanya, Rabu (6/3/2024).

Menurut Heru, KJMU itu diberikan kepada mahasiswa atau masyarakat yang memang tidak mampu untuk membayar uang kuliah. Namun, jika data yang sudah di link-kan dengan data pajak seperti data kendaraan pribadi, maka dianggap orang yang mampu.

"Masa kita berikan bantuan? Padahal

dana ini terbatas, kita bisa berikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, yang memang layak secara data," jelasnya.

"Data di DKI itu sekali lagi bisa di-link-kan dengan data lainnya. Itu otomatis langsung. Dia punya berapa kendaraan, punya berapa mobil, punya rumah, rumahnya ada di mana itu kita bisa (lihat). Jadi kalau dia klaim kita lihat "oh kamu punya kendaraan, punya mobil, orangtuanya mampu masa kita berikan," tambahnya.

Ingatkan Pemprov

Sementara itu DPRD DKI Jakarta telah mewanti-wanti Dinas Pendidikan DKI Jakarta soal wacana pengurangan kuota bantuan sosial KJMU.

Hal itu sudah diperingatkan dewan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta pada 2023 lalu saat membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) 2024.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengaku, sudah mengingatkan eksekutif untuk berhati-hati terhadap rencana pemangkasan anggaran yang berimplikasi berkurangnya jumlah penerima KJMU.

Dari belasan ribu penerima, hanya ribuan orang yang akan menerima KJMU dari Pemprov DKI Jakarta.

"Dari total 19.000 (penerima KJMU) jadi 7.900 orang yang dapat. Diturunkan kuotanya, cuma kami protes tetap saja mereka bilangnyanya segitu," ucap Ima pada Rabu (6/3/2024).

Alhasil, kata Ima, gejolak adanya isu pencabutan KJMU menyeruak ke publik bahkan ke media sosial. Banyak mahasiswa yang kecewa dengan kebijakan tersebut, dan merasa khawatir untuk melanjutkan pendidikannya.

"Akhirnya hari ini kejadian, karena

logikanya orang yang dapat KJMU itu sudah harus sampai tuntas, dia nggak perlu pendaftaran tiap tahun," ucap Ima.

"Karena kan KJMU ibarat kata kuliah itu anggaran awal besar, ketika di awal dia layak menerima bantuan ya harus sampai selesai. Kalau mau pendataan ya di semester pertama, bukan di tengah jalan dipotong," sambungnya.

Carut Marut

Ima menyoroti adanya dugaan carut marut pendataan penerima KJMU. Dia mengungkap, ada warga yang meminjamkan identitasnya untuk digunakan kepemilikan kendaraan, padahal aslinya mereka warga yang tidak mampu.

"Sebenarnya pendataan kan sudah carut marut ini sebenarnya sudah dari rapat komisi, rapat Banggar saya sampaikan juga ketika orang-orang itu mungkin yang tadi punya mobil atau KTP/KKnya dipakai

untuk mobil punya orang lain, jadi muncul lagi nih (tidak layak terima KJMU)," jelas Ima.

Untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, kata dia, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Salah satunya dengan bantuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga usia produktif di masa mendatang bisa bersaing dengan baik dan secara sehat.

"Kita kan mau Indonesia Emas 2045 nah jadi harus maksimalkan KJMU, karena selama ini masyarakat tidak bisa daftar KJMU. Awal kuliah kan disuruh bayar besar Rp 10-30 juta akhirnya mereka nggak bisa daftar," ucapnya.

Diketahui, Disdik DKI Jakarta disebut menghentikan program KJMU untuk mahasiswa di Jakarta. Keluhan sejumlah mahasiswa itu kemudian viral di media sosial. (faf/m26)